

Building Tax-Aware Villages: Synergy of Leadership and Community Awareness in Paying Land and Building Tax

Atika Purnamasari^{1*}

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi, Tangerang, 15710, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Gaya Kepemimpinan,
Kesadaran Masyarakat,
Kepatuhan pembayaran
PBB.

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the influence of leadership style and community awareness on compliance with Land and Building Tax (PBB) payments in Pangarengan Village, Rajeg District, Tangerang Regency. **Background Problems:** This study is based on the still low level of taxpayer compliance in PBB payments in rural areas, despite the government's various socialization efforts and incentives. The village head's leadership style and community awareness are thought to play an important role in encouraging tax compliance. **Research Methods:** The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires to 94 PBB taxpayer respondents in Pangarengan Village. Data analysis was conducted using SPSS 25. **Finding/Results:** The results showed that leadership style and community awareness have a positive and significant effect on PBB payment compliance. **Conclusion:** This finding indicates that the better the leadership and the higher the community awareness, the higher the regional tax compliance. The implications of this study emphasize the importance of participatory leadership and continuous education in increasing PBB revenue at the village level.

Pendahuluan/Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. **Latar Belakang Masalah:** Penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di wilayah pedesaan, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pemberian insentif. Faktor gaya kepemimpinan kepala desa dan tingkat kesadaran masyarakat diduga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. **Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 94 responden wajib pajak PBB di Desa Pangarengan. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 25. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB. **Kesimpulan:** Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kepemimpinan dan semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin meningkat pula kepatuhan pajak daerah. **Implikasi penelitian** ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan partisipatif dan edukasi berkelanjutan dalam meningkatkan penerimaan PBB di tingkat desa.

* Corresponding Author at Department of Economics, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdana Indonesia, Jl Citra Raya Utama Barat No. 29, Cikupa, Tangerang, 15710, Indonesia.
E-mail address: purnamasariatika93@gmail.com

INTRODUCTION

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar karena objek pajaknya berupa tanah dan bangunan yang bersifat tetap dan dapat didata dengan jelas. PBB berperan penting dalam memperkuat keuangan daerah, termasuk pada tingkat desa, karena sebagian dari penerimaannya menjadi bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PBB merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata memperoleh manfaat dari kepemilikan tersebut (Pajak.go.id, 2022).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih relatif rendah di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam publikasi Kecamatan Rajeg Dalam Angka 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, tercatat bahwa realisasi penerimaan PBB di sejumlah desa di Kecamatan Rajeg masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (BPS Kabupaten Tangerang, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi di lapangan, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak.

Desa Pangarengan merupakan salah satu desa di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah sekitar 348,5 hektar dan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun (Desa Pangarengan, 2024). Potensi objek PBB di desa ini cukup besar karena terdapat lahan pertanian, pemukiman padat, serta bangunan komersial yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara informal dengan perangkat desa tahun 2024, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menunda pembayaran PBB bahkan hingga dua tahun terakhir, sehingga realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat PBB, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Menurut penelitian Handayani (2023) dan Pramudita & Nurdina (2025) kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB, di mana masyarakat yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan lebih cenderung membayar tepat waktu.

Selain faktor kesadaran masyarakat, gaya kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal perpajakan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa dapat memengaruhi tingkat motivasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Kepala desa dengan gaya kepemimpinan partisipatif, komunikatif, dan persuasif biasanya lebih berhasil dalam mendorong masyarakat agar patuh terhadap pembayaran PBB. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter atau kurang transparan dapat menurunkan rasa tanggung jawab masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Mokodongan, 2021) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam konteks Desa Pangarengan, kesadaran masyarakat ini masih beragam. Sebagian masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial desa menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kewajiban pajak, namun sebagian lainnya masih menganggap PBB sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung. Minimnya informasi tentang manfaat pajak yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Rajeg secara umum memiliki sarana pemerintahan desa yang memadai, termasuk kantor desa dan fasilitas informasi publik di setiap desa (BPS Kabupaten Tangerang, 2018). Namun, fasilitas yang tersedia belum diikuti dengan optimalisasi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, khususnya dalam hal sosialisasi pajak. Padahal, menurut teori kepemimpinan partisipatif, komunikasi yang efektif antara pemimpin dan masyarakat merupakan kunci terciptanya kepatuhan dalam menjalankan peraturan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Pangarengan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor perilaku dan kepemimpinan lokal. Kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mendorong masyarakat agar sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana gaya kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi peningkatan penerimaan pajak melalui pendekatan kepemimpinan yang efektif serta peningkatan kesadaran

wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan PBB di tingkat desa dan memperkuat kapasitas kepala desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di wilayah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan penerimaan PBB di tingkat desa tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah daerah atau kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga pada sinergi antara gaya kepemimpinan kepala desa yang mampu memotivasi masyarakat serta tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya. Keduanya menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

LITERATURE REVIEW

Teori Kepemimpinan (*Leadership Theory*)

Salah satu kerangka penting untuk memahami perilaku pemerintahan desa adalah teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin dan rekan-rekannya. Lewin mengidentifikasi tiga gaya utama: kepemimpinan otoriter (*autocratic*), demokratis (*democratic/participative*), dan *laissez-faire*. Gaya otoriter ditandai dengan keputusan yang diambil oleh pemimpin tanpa konsultasi, sedangkan gaya demokratis melibatkan partisipasi anggota/masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan gaya *laissez-faire* memberi kebebasan lebih besar kepada anggota dalam menentukan tindakan mereka sendiri (Lewin et al., 1939). Gaya kepemimpinan kepala desa yang komunikatif, partisipatif, dan transparan (gaya demokratis) dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban pajak seperti pembayaran PBB, sedangkan gaya yang kurang partisipatif mungkin menghambat keterlibatan masyarakat.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* - TPB)

Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menyatakan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah prediktor langsung dari perilaku tersebut, dan niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Ajzen., 1991). Kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat dilihat sebagai bagian dari sikap dan norma subjektif yang memengaruhi niat mereka untuk patuh membayar PBB. Sementara kontrol perilaku yang dirasakan bisa merujuk pada seberapa mudah atau percaya masyarakat bahwa mereka mampu melakukan pembayaran pajak (misalnya fasilitas, informasi, kemudahan layanan).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan terdiri dari kata bumi dan bangunan. Bumi ialah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Permukaan bumi mencakup daratan serta air. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknis yang secara bertahap ditanam atau diletakkan di atas tanah dan air. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sampai saat ini adalah sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia terhadap objek pajak sejenis (Muttaqin, 2023).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak atau tax compliance didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak yang secara sukarela dan tepat waktu memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Faktor-penentu kepatuhan mencakup aspek ekonomi (misalnya sanksi dan pengawasan), aspek psikologis (seperti moral dan kepercayaan terhadap pemerintah), serta aspek sosial (norma sosial dan legitimasi institusi) (Misra, 2019). Dalam kerangka konseptual, penelitian empiris menunjukkan bahwa norma subjektif (*social norms*) dan persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan legitimasi sistem pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku kepatuhan mereka (Onu & Oats, 2015). Dengan demikian, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di

masyarakat desa, perlu diperhatikan bukan hanya aspek administratif dan regulasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat, memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah lokal sebagai otoritas yang sah.

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Kurniawati et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat, termasuk dalam kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Yana (2021) gaya kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat. Kepala desa dengan gaya kepemimpinan partisipatif dan komunikatif mampu mendorong masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawati et al. (2022) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.

H₁ : Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan bentuk pemahaman dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya Perpajakan Edisi Terbaru, kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin besar pula kemauan untuk patuh membayar pajak tepat waktu (Wardani dan Asis, 2017). Hasil penelitian oleh Pramudita & Nurdina (2025) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang sadar akan manfaat pajak cenderung lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban PBB.

H₂ : Terdapat pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data kuantitatif menggunakan angket atau kuesioner digunakan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat wajib pajak Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg. Jumlah populasi : 1.536 orang (wajib pajak) Tahun 2024 di lihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Di desa Pangarengan

Tahun	WP (SPPT)	Target PBB	Realisasi PBB
2021	1.279	246.555.125	225.195.100
2022	1.279	357.550.154	300.918.850
2023	1.247	333.045.410	325.881.454
2024	1.536	207.782.348	195.480.828

Sumber Desa Pangarengan 2025

Penelitian ini akan mengambil sampel 94 orang dari populasi dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengumpulkan data terkait sudut pandang, sikap, dan pendapat. Validitas kuesioner dinilai menggunakan analisis korelasi bivariat di SPSS 25. Penelitian ini menggunakan uji SPSS Cronbach Alpha dalam SPSS 25 untuk menilai reliabilitas instrumen. Analisis data juga mencakup uji normalitas, analisis korelasi parsial, uji regresi berganda, uji hipotesis parsial (t), uji hipotesis simultan (F) dan analisis koefisien determinasi (R²).

RESULTS

Uji Validitas

Tabel 2. Tabel Uji Validitas

Variabel	Kode item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Gaya kepemimpinan	P1X1	0,2028	0,341	Valid
	P2X1	0,2028	0,334	Valid
	P3X1	0,2028	0,591	Valid
	P4X1	0,2028	0,649	Valid
	P5X1	0,2028	0,737	Valid
	P6X1	0,2028	0,488	Valid
	P7X1	0,2028	0,335	Valid
	P8X1	0,2028	0,499	Valid
	P9X1	0,2028	0,316	Valid
	P10X1	0,2028	0,396	Valid
Kesadaran Masyarakat	P1X2	0,2028	0,532	Valid
	P2X2	0,2028	0,475	Valid
	P3X2	0,2028	0,769	Valid
	P4X2	0,2028	0,604	Valid
	P5X2	0,2028	0,356	Valid
	P6X2	0,2028	0,417	Valid
	P7X2	0,2028	0,733	Valid
	P8X2	0,2028	0,598	Valid
	P9X2	0,2028	0,767	Valid
	P10X2	0,2028	0,757	Valid
Kepatuhan pembayaran PBB	P1Y	0,2028	0,850	Valid
	P2Y	0,2028	0,848	Valid
	P3Y	0,2028	0,803	Valid
	P4Y	0,2028	0,852	Valid
	P5Y	0,2028	0,749	Valid
	P6Y	0,2028	0,851	Valid
	P7Y	0,2028	0,871	Valid
	P8Y	0,2028	0,816	Valid
	P9Y	0,2028	0,746	Valid
	P10Y	0,2028	0,788	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung), yang lebih besar dari korelasi pearson atau (r tabel = 0,2028) dapat disimpulkan bahwa valid.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Tabel Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Gaya Kepemimpinan	0,603	Reliabel
Kesadaran Masyarakat	0,810	Reliabel
Kepatuhan pembayaran PBB	0,944	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan pembayaran PBB mempunyai nilai Cronbach's Alpha yang besar yaitu > 0,60 maka dapat dikategorikan seluruh pertanyaan kuesioner pada variabel tersebut dapat dinilai reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
	Asymp.Sig (2-tailed)	Tolerance	VIF	Chi Square Hitung
Gaya Kepemimpinan	0,053	0,999	1,001	10,112
Kesadaran Masyarakat		0,999	1,001	

Dependen Variable : Kepatuhan pembayaran PBB

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini (Ghozali, 2013), jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal. Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai sig. 0,053 $> 0,05$, berarti data penelitian bersifat normal. Hasil uji multikolonieritas diperoleh data bahwa nilai tolerance Gaya Kepemimpinan sebesar 0,999, dan Kesadaran Masyarakat sebesar 0,999. semua nilai tolerance tersebut masing-masing bernilai lebih dari 0,1. Sementara nilai dari VIF Gaya Kepemimpinan sebesar 1,001, dan Kesadaran Masyarakat 1,001. Semua nilai VIF tersebut masing-masing $< 10,00$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas. Untuk nilai Chi Square tabel sebesar 11,070, sedangkan Chi Square hitung sebesar 10, 112. Jika Chi square hitung $<$ Chi square tabel dimana angkanya $10,112 < 11,070$ maka menandakan tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Uji Hipotesis Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,752	4,367		,401	,689
	Gaya Kepemimpinan	,641	,096	,521	6,710	,000
	Kesadaran Masyarakat	,408	,078	,407	5,247	,000

Dependent Variable: Kepatuhan pembayaran PBB

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB dengan nilai sig. 0,000 $< 0,05$ dan t hitung sebesar 6,710, sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima. Diketahui bahwa variabel kesadaran masyarakat mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB dengan nilai sig. 0,000 $< 0,05$ dan t hitung sebesar 5,257, sehingga dapat disimpulkan H_2 diterima

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673a	,453	,441	3,19711

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat, Gaya Kepemimpinan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dengan hasil analisis secara simultan dapat dikatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu kesadaran masyarakat dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pembayaran PBB sebanyak 44,1%, dan sisanya yaitu 55,9% (100%-44,1%) dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DISCUSSION

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, diperoleh temuan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan kepala desa terutama yang bersifat partisipatif, komunikatif, dan teladan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Hasil ini sejalan dengan teori kepemimpinan menurut (Robbins dan Judge, 2019) yang menyatakan bahwa pemimpin berperan penting dalam memengaruhi perilaku, motivasi, dan sikap individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa bukan hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga figur yang mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak daerah.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa di Desa Pangarengan terbukti mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, memberikan pemahaman tentang manfaat pajak, serta menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Kepala desa secara rutin melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PBB dan memberikan contoh nyata dengan membayar pajak tepat waktu. Upaya ini membentuk norma sosial di masyarakat bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi untuk kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen I., 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kepala desa yang aktif dan komunikatif mampu memperkuat ketiga faktor tersebut melalui teladan, sosialisasi, dan pemberian kemudahan dalam proses pembayaran.

Secara empiris, kondisi ini didukung oleh fakta lapangan bahwa tingkat realisasi PBB di Desa Pangarengan mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2024), Kecamatan Rajeg termasuk wilayah dengan tingkat kepatuhan pajak yang cukup baik di antara kecamatan lainnya, meskipun masih terdapat beberapa desa yang belum mencapai target realisasi PBB. Keberhasilan Desa Pangarengan tidak terlepas dari peran aktif kepala desa dalam menggerakkan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk melakukan penagihan dan sosialisasi secara langsung kepada warga (BPS Tangerang, 2024).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mokodongan, 2021), (Karina, 2017), (Harahap & Rambe, 2024) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepala desa yang mampu berinteraksi secara efektif, memberikan arahan yang jelas, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, penelitian oleh (Kurniawati et al., 2022) menunjukkan hasil serupa bahwa kepemimpinan partisipatif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah dan berdampak pada peningkatan realisasi PBB. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2024) dan (Cholistia, 2021) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian ini menunjukkan himbauan kepada desa terus diadakan, namun wajib pajak masih enggan dalam mematuhi pelaporan pajak.

Dengan demikian, Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa memiliki peran strategis dalam membangun budaya patuh pajak di tingkat desa. Kepala desa yang mampu mengedepankan keterbukaan, keteladanan, dan pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi pajak, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini penting karena kepercayaan publik merupakan dasar bagi keberhasilan kebijakan fiskal di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kepala desa agar mampu mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih adaptif, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di seluruh wilayah Kecamatan Rajeg dapat terus meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemauan mereka untuk membayar PBB tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini selaras dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor utama dalam peningkatan kepatuhan pajak daerah adalah tingkat kesadaran masyarakat, yang meliputi pemahaman terhadap fungsi pajak, kesediaan untuk berkontribusi, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap pembangunan daerah.

Kesadaran masyarakat dalam konteks PBB mencakup pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi langsung dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, sebagian besar masyarakat Desa Pangarengan menyatakan bahwa mereka membayar PBB karena menyadari manfaat nyata pajak bagi lingkungan sekitar, misalnya peningkatan fasilitas umum dan kebersihan desa. Temuan ini didukung oleh data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang (2024) yang menunjukkan peningkatan realisasi PBB-P2 sebesar 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya karena adanya peningkatan kesadaran

masyarakat di beberapa desa termasuk Desa Pangarengan (Bapenda Tangerang, 2024). Secara teoritis, hubungan antara kesadaran dan kepatuhan ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen I., 1991), di mana kesadaran seseorang terhadap manfaat dan tanggung jawab sosial pajak membentuk sikap positif terhadap perilaku membayar pajak. Sikap positif tersebut kemudian diperkuat oleh norma sosial di lingkungan masyarakat yang menganggap membayar pajak sebagai bentuk kontribusi bersama terhadap pembangunan. Dengan demikian, ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka mereka lebih mungkin bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Kurniawati et al., 2022), (Mella Handayani, 2023) dan (Pramudita & Nurdina, 2025), (Dwiastuti, 2024) menghasilkan penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memiliki perilaku patuh dan menganggap pembayaran PBB sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Rohmah & Nuridah, 2024), (Krisdayanti & Wahyudi, 2022), (Mudrikah dan Ardyan, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Di Desa Pangarengan sendiri, faktor kesadaran masyarakat diperkuat oleh dukungan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang aktif mengingatkan warga agar membayar pajak sebelum jatuh tempo. Bentuk kesadaran kolektif ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang membayar PBB secara mandiri tanpa harus didatangi petugas. Data dari Kecamatan Rajeg Dalam Angka 2024 (BPS Tangerang, 2024) juga menunjukkan bahwa Desa Pangarengan termasuk salah satu desa dengan tingkat kepatuhan tertinggi, yaitu mencapai 94,7% dari total wajib pajak terdaftar.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan kebijakan pajak daerah, khususnya PBB di tingkat desa. Pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat pajak melalui pertemuan warga, media sosial desa, dan kerja sama dengan Bapenda. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menumbuhkan budaya sadar pajak yang berkelanjutan di masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan teladan mampu meningkatkan motivasi warga untuk taat pajak. Sementara itu, kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan desa turut memperkuat perilaku kepatuhan. Hasil ini mendukung teori kepemimpinan (Robbins dan Judge, 2019) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen I., 1991) yang menekankan peran sikap dan norma sosial dalam membentuk perilaku positif.

MANAGERIAL IMPLICATION

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat teori bahwa kepemimpinan dan kesadaran sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Secara praktis, pemerintah desa dan Bapenda Kabupaten Tangerang perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi pajak, serta pelatihan kepemimpinan bagi aparatur desa agar mendorong budaya sadar pajak. Pemanfaatan teknologi pembayaran PBB digital juga dapat memperkuat transparansi dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

LIMITATION AND FUTURE RESEARCH

Penelitian ini terbatas pada wilayah Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Variabel yang diteliti hanya mencakup gaya kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pendapatan, pendidikan, dan pelayanan pajak. Selain itu, penggunaan kuesioner tertutup berpotensi menimbulkan bias jawaban responden.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) agar hasilnya lebih mendalam dan komprehensif.

REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational behavior and human decision processes, 50 (2), 179-211.
- Bapenda Tangerang. (2024). <https://bapenda.tangerangkab.go.id/>
- BPS Kabupaten Tangerang. (2018). *Kecamatan Rajeg Dalam Angka 2018*. <https://web-api.bps.go.id/>
- BPS Tangerang. (2024). <https://tangerangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/4a948f5068ee1b7935d72b07/kecamatan-rajeg-dalam-angka-2024.html>.
- Cholistia, A. Y. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan* (Studi Pada Wajib Pajak Didesa Balongbendo)
- Dwiastuti, M. M. P., Supardi, & Yuli Astuti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman Tahun 2018–2021. *Prima Ekonomika*, 15(1). DOI / link: <https://doi.org/10.37330/prima.v15i1.167>
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, N., & Rambe, S. (2024). The Influence Of Head Of Village Leadership And Tax Administration Sanctions On Public Awareness In Efforts To Pay Land And Building Tax In Sayurimatinggi Village, Batangonang Sub-District, Padanglawas Utara District. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(3), 260–275.
- Karina, N. Y. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Krisdayanti, M., & Wahyudi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art56>
- Kurniawati, S., Afifudin, & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kelurahan Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11(4), 1–10.
- Lewin, K., Lippitt, R. and White, R.K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. *Journal of Social Psychology*, 10, 271–301
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mella Handayani. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 8 (Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2), 01.
- Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development And Tax Enforcement Models. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 03(02), 189–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>
- Mokodongan, R. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.58406/kapitaselekt.v3i2.1086>
- Mudrikah Ratna Imtiyazari, Ardyan Firdausi Mustoffa, N. H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44.
- Muttaqin, F. (2023). Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(21), 101–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.432>
- Nurdiana, R. (2021). The Effect of Environmental Uncertainty and Financial Distress on Tax Avoidance with Business Strategy as Moderating Variables. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 1(9), 943–951. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v1i9.209>
- Onu, D., & Oats, L. (2015). The Role of Overview and Practical Implications. *Journal of Tax Administration*, 1(1), 113–137. <http://jota.website/article/view/11/64>
- Pajak.go.id. (2022). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-bumi-dan-bangunan-siapa-yang-mengelola> Desa Pangarengan. (2024). <https://desapangarengan.github.io>.
- Pramudita, S. A., & Nurdina. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Journal of Sustainability Business Research*, 6(1), 86–96.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior (18th ed.)*. Pearson Education.

- Rohmah, S. N., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210.
- Sari, W. E., Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., & Zuraidah, I. (2024). Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Owner*, 8(1), 828–838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan ke-25*, Bandung : Alfabeta
- Wardani, D., & Asis, S. (2017). Kesadaran Wajib Pajak: Pengertian dan Pentingnya dalam Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 5(2), 4556.
- Yana, E. S. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan). *Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442/2021*.